BAB V
KESIMPULAN

Dinamika politik internasional pada era globalisasi ternyata tidak bisa dilepaskan dari persoalan keamanan non-tradisional. Persoalan-persoalan yang mncul ternyata tidak hanya konflik antar bangsa, namun telah berkembang luas dan mengarah ke persoalan-persoalan keamanan non-tradisional, yaitu terorisme. Salah satu tonggak sejarah bagi masyarakat dunia dalam memerangi terorisme adalah tragedi WTC (*World Trade Centre*) pada 11 September 2001.

Dinamika politik luar negeri Amerika Serikat ternyata tidak lepas dari wilayah Timur-Tengah. Hal ini disebabkan karena wilayah ini menjadi bagian dari *pivot point* kepentingan nasional Amerika Serikat, baik pada bidang politik, ekonomi atau keamanan. Salah satu negara di wilayah Timur-Tengah dalam hal ini adalah Irak.

Salah satu konflik terkini yang terjadi di tahun 2014 adalah pemberontakan ISIS yang merupakan organisasi fundamental Islam yang didirikan pada 3 Januari 2014. Organisasi ini memiliki empat faham ideologi sekaligus, masing-masing yaitu Islamism Sunni, Salafist Jihadism. Worldwide Caliphate dan Anti Shiaism Dari sisi kepemimpinannya, ISIS tidak lepas dari peranan tiga tokoh pemimpin, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Oemar al-Shisani dan Abu Mohammad al-Adnani.

Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberintakan ISIS ternyata menjadi fenomena politik internasional yang menarik. Hal ini disebabkan negara adikuasa ini telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar, meliputi dukungan program/teknis, antara lain pelatihan terhadap personel Irak dan kelompok Kurdi, serta pengiriman personel dan armada tempur ke wilayah Irak untuk memerangi kelompok ISIS. Kasus ini tentunya menunjukkan

adanya kepentingan yang begitu besar dari Amerika Serikat sehingga negara ini berupaya menerapkan bentuk-bentuk intervensinya secara sistematis dan terencana.

Pada periode 2006-2014, keberadaan Timur-tengah masih memiliki peranan yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak ternyata menunjukkan bahwa negara adikuasa ini memiliki kepentingan yang begitu besar dalam kasus ini. Kepentingan ini meliputi bidang politik dan keamanan, serta ekonomi. Ini membuktikan bahwa intervensi Amerika Serikat ke Irak merupakan bagi alamiah dari satu negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, terkait dengan kepentingan yang bersifat mendasar (*elementary interest*).

Kepentingan politik dan keamanan dibalik Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak berkaitan dengan upaya negara adikuasa ini dalam memerangi terorisme, sekaligus menegakan supremasi demokrasi dan HAM, sesuai dengan telah diamanatkan oleh para founding father Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan pemberontakan ISIS di Irak, maka kasus kekerasan yang terjadi merpakan bagian dari pelangaran HAM dan demokrasi yang sebenarnya diperkirakan akan membaik pasca berakhirnya perang terhadap terorisme di tahun 2003/2004, namun dengan adanya pemberontakan ISIS maka masa depan HAM dan demokrasi di Irak akan lebih sulit.

Kemudian kepentingan selanjutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, dimana Irak memiliki sumber daya alam penting, khususnya minyak bumi dan keberadaannya sebagai pangsa pasar industri-industri Amerika Serikat. pada periode 2006-2014 semakin banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Irak dan juga kerjasama eksplorasi pengembangan energi, yaitu minyak bumi. Dengan adanya pemberontakan ISIS maka masa depan ekonomi Amerika Serikat di Irak akan lebih sulit.

Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan pokok Amerika Serikat untuk menolak gangguan keamanan internasional yang berdampak buruk pada eksistensi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Sekitar 58 persen perekonomian nasional negara ini ditopang oleh sektor industri. Masalah yang muncul adalah menyangkut tingkah laku dan sikap politik pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Sebagian elit politik Amerika Serikat sendiri menganggap bahwa perekonomian nasional negara ini akan terganggu jika, Amerika Serikat tidak secara serius ikut mendukung keamanan di wilayah Timur-Tengah, termausk Irak.

Bagi Amerika Serikat ekspor minyak dari Irak menjadi hal yang sangat penting bagi kebutuhan dalam negeri negara adikuasa ini. Seperti yang terlihat pada tabel diatas pada tahun 2008, ekspor minyak dari Irak ke Amerika Serikat mencapai angka di atas 130 ribu barrell dan di tahun 2010. Inilah yang menjadi motivasi pemerintah Amerika Serikat untuk menangani ISIS di Irak.

Melalui penelitian ini, berhasil dirumuskan beberapa saran, sekaligus sebagai bagian dari temuan akademik (*learning point*) bahwa masalah terorisme ternyata telah menjadi isu yang mendorong solidaritas negara-bangsa untuk secara bersama-sama menangani persoalan ini secara efektif. Jika dikaitkan dengan kasus ISIS di Irak, maka apa yang dijalankan oleh Amerika Serikat tentunya dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk menangani persoalan-persoalan keamanan yang serupa. Jika dikaitkan dengan kurikulum akademik maka hal ini relevan dengan kajian politik-pemnerintahan Timur-Tengah dan isu-isu global kontemporer, serta dinamika politik negara-negara Islam.

Kemudian saran selanjutnya berkaitan dengan adanya kepentingan negara-negara adikuasa, khususnya Amerika Serikat dalam menangani yang harus disingkapi secara proporsional. Dalam isu terorisme, baik Irak ataupun Amerika Serikat sama-sama memiliki kepentingan, namun jangan sampai negara begitu tergantung dengan peran negara adikuasa.

Kasus ini juga berlaku bagi kerjasama-kerjasama negara-negara dunia, termasuk Indonesia yang juga menjalankan kerjasama bidang keamanan dengan beberapa negara dunia untuk menangani jaringan terorisme internasional termasuk dengan Amerika Serikat. Kajian inilah yang menjadi tema penting yang diharapkan dapat menjadi obyek penelitian-penelitian selanjutnya.